

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi saat ini terlihat sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya melahirkan era informasi global, tetapi juga melahirkan media informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Pengaruh global juga dirasakan pada bidang ekonomi dan manajemen yang sangat berkaitan dengan teknologi, yakni dengan munculnya peralatan-peralatan teknologi canggih yang memudahkan usaha manusia dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas untuk menghadapi persaingan. Disamping kecanggihan teknologi, instansi pemerintahan dituntut untuk mampu menghadapi tingkat persaingan yang tinggi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Penggunaan komputer dan sistem-sistemnya sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintahan. Setiap proses manual dari instansi pemerintahan tersebut dapat digantikan dengan sistem yang terkomputerisasi selain itu pemanfaatannya dapat juga digunakan dalam membantu presensi. Presensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi, atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah

untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Pada umumnya diberbagai instansi pemerintahan sudah

menggunakan sebuah alat presensi otomatis yang sering dikenal dengan sebutan fingerprint.

Fingerprint adalah alat yang digunakan sebagai pengenal identitas, melindungi komputer dari data atau pemakaian komputer oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dengan menggunakan fingerprint sebagai pengganti tanda tangan dapat mengetahui identitas pemilik dari sidik jari. Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari di perusahaan atau instansi, alat ini mendorong kantor Dinas Sosial untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin keamanan.

Fingerprint memiliki beberapa keuntungan yaitu mengatasi kecurangan dalam proses presensi, membantu manajemen presensi menjadi lebih baik dan akurat. data lebih akurat, meningkatkan disiplin kehadiran kerja pegawai serta menghindari praktek manipulasi absensi. Akan tetapi penerapannya, fingerprint sendiri masih memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi didalam suatu instansi pemerintahan diantaranya adalah ketidaktepatan dalam pengelolaan sistem informasi data absensi dalam ketidakhadiran seorang pegawai. maka hal itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas seorang pegawai, oleh karena itu, agar dapat menerapkan implementasi fingerprint yang baik, dibutuhkan kegiatan pemeriksaan yang dikenal dengan audit sistem informasi.

Dalam melakukan audit, diperlukan sebuah standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan reliable. dalam penelitian ini, metode yang

digunakan adalah COBIT 4.1 domain ME(Monitor and Evaluate).Standar COBIT (*Control Objectives for information and related Technology*) dipilih karena kerangka kerja COBIT memberikan gambaran paling detail mengenai strategi dan kontrol dalam pengaturan proses sistem informasi.Serta penerapan domain ME(*Monitor and Evaluate*),karena domain ini fokus pada pemantauan proses agar TI dapat memberikan kontibusi pada pencapaian tujuan Kantor Wali Nagari Ladang Panjang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul:  
**“AUDIT PENERAPAN SISTEM INFORMASI FINGERPRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT PADA KANTOR WALI NAGARI LADANG PANJANG “**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu masalah yaitu

1. Bagaimana cara melakukan audit penerapan sistem informasi fingerprint dalam meningkatkan disiplin pegawai ?
2. Apakah Fingerprint yang digunakan saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan?

### **1.3. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan adanya audit penerapan Sistem Informasi Fingerprint proses pengelolaan data absensi pegawai dapat meminimalisir permasalahan yang timbul.
2. Dengan adanya Sistem Informasi Fingerprint dapat meningkatkan disiplin pegawai.

#### **1.4. Batasan masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan terhadap sistem penulisan, adapun batasan dari penulisan yaitu:

1. Dalam proses Audit Sistem Informasi mengacu pada standar Framework cobit 4.1 domain ME(Monitor and Evaluate).
2. Data yang digunakan dalam audit dan pembahasan masalah adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner.
3. Objek penelitian adalah Kantor wali nagari ladang panjang, Bagian Pemograman, Bagian Jaringan, dan Staf Pegawai.

#### **1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan lebih jauh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang audit sistem informasi dengan framework Cobit 4.1.
2. Dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh sistem.

3. Sebagai acuan kebijakan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian tujuan kantor Wali Nagari Ladang Panjang.

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dalam pengukuran kualitas fingerprint pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang.

2. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai batu loncatan bagi penulis untuk menetapkan dan mengembangkan wawasan di bidang ilmu pengetahuan komputer, sehingga penulis mampu menciptakan suatu sistem yang bermanfaat.
- b. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam mengaudit suatu sistem dan perhitungan data kuesioner.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **1.6 Tinjauan Umum Wali Nagari**

- (1). Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2). Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

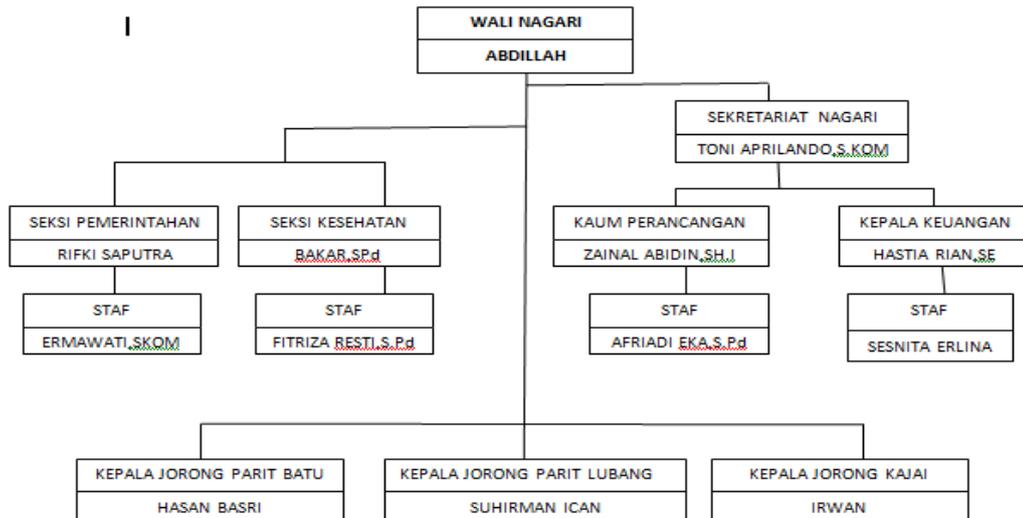
(3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali

Nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### 1.7.1. Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WALI NAGARI LADANG PANJANG



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Ladang Panjang**